



KATA PENGANTAR

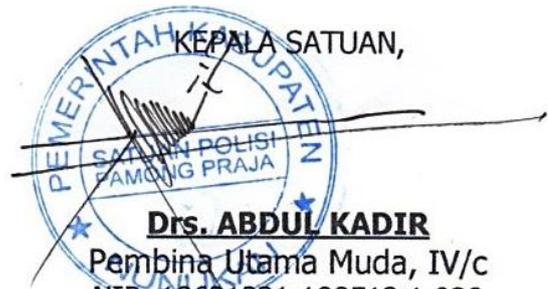
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas BerkatNya dan RahmatNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dapat disusun dengan baik.

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2020 adalah sebagai bentuk penjabaran dan integrasi dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 yang telah ditetapkan dan Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan serta memberi gambaran tentang penjabaran lebih rinci mengenai Program dan Kegiatan serta target capaian kinerja masing-masing yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) 2020 yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2020 dan juga akan menjadi bahan evaluasi pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun berikutnya.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan ini disusun, semoga dapat menjadi tolak ukur dan menjadi pedoman bagi semua pihak dan untuk mewujudkan Penegakan Perda, penegakan Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 22 Juli 2019

KEPALA SATUAN,

Drs. ABDUL KADIR
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19621231 198512 1 028



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I		
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II		
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.3 Isu Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	15
2.4 Reviw Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	18
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III		
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	24
3.3 Program dan Kegiatan	26
BAB IV		
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB V		
PENUTUP	33



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun, sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Nunukan mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2020.
3. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang



dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2016 – 2021.

Keberhasilan penegak Perda dan Perbup, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan sangat berdampak langsung dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan *Good Governance*. Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh APBD, namun hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem penegakan Perda, Perbup dan Ketertiban umum daerah saat ini mampu memberikan nuansa rasa Aman, Tertib dan Sejahtera.

Sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP dimana daerah memiliki urusan yang menjadi kewenangan, meliputi ***urusan wajib***, yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar.



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunuka tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Penyempurnaan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Permenpan dan RB. Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 Tentang EKPPD ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 11 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan



Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016- 2021.

18. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.
19. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2020
20. Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2016- 2021 Nomor 188.4/16.01/SATPOL.PP/I/2019

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2020 dimaksudkan sebagai panduan menyusun dan merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dan juga melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2020 adalah untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021



1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2020 meliputi:

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab. II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab. III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telahaan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab. V Penutup



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja selain merupakan wujud pertanggungjawaban Satpol PP Kabupaten Nunukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan, juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2018 dalam mewujudkan sasaran, tujuan, organisasi sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis lewat pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun pencapaian kinerja Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan tindak kriminal (Target 100 % Realisasi 94 %)
- b. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Target 12 Bulan Realisasi 12 Bulan)
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Target 2 Orang Realisasi 2 Orang)



- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Target 9 Dokumen Realisasi 9 Dokumen)
 - Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Target 12 Bulan Realisasi 12 Bulan)
- c. Realisasi terhadap Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Target 100% Realisasi 101%)
 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Target 265 Stel Realisasi 301 Stel dengan capaian 114%)
 - Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di daerah (Target 83% Realisasi 169%)
- d. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :
- Adanya Rasionalisasi Anggaran
 - Penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan
 - Realisasi pembayaran utang tahun sebelumnya
- e. implikasi terhadap capaian program renstra perangkat daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- Melihat skala prioritas dari Program/Kegiatan dalam Melakukan rasionalisasi, agar tidak berdampak pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
 - Mengusulkan kembali Program/Kegiatan dan pagu untuk pencapaian target yang belum terpenuhi.

dari uraian tersebut diatas dapat disajikan kedalam tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah sebagai berikut :



REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019 (TAHUN BERJALAN)

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2018 (Tahun lalu n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 (berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1										
1	05									
1	05	03	01							
1	05	03	01	02						
1	05	03	01	06						
1	05	03	01	08						
1	05	03	01	09						
1	05	03	01	10						
1	05	03	01	11						
1	05	03	01	12						
1	05	03	01	13						
1	05	03	01	17						



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2018 (Tahun lalu n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 (berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 05 03 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Dokumen Koordinasi dan Konsultasi	90	90	90	99	111	90	189	211
1 05 03 01 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Koordinasi, Konsultasi, Integritas dan Sinergitas berjalan lancar	90	90	90	96	107	90	186	207
1 05 03 01 20	Penyediaan Jasa Umum Perkantoran	Tersedianya jasa umum perkantoran	12	12	12	12	100	12	24	200
1 05 03 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	TERSEDIAANYA SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG MEMADAAI	100	100	100	100	100	100	200	200
1 05 03 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12	12	12	12	100	12	24	200
1 05 03 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	TERCIPANYA KUALITAS SDM APARATUR	265	0	265	301	114	0	301	114
1 05 03 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya	265	0	265	301	114	0	301	114
1 05 03 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN KAPASITAS SERTA PENGETAHUAN PERSONIL SATPOL PP DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSI	2	0	2	2	100	2	4	200
1 05 03 05 05	Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi PNS Daerah	Tersedianya SDM yang berkualitas dan berspesifikasi dalam melaksanakan tupoksi	2	23	2	2	100	2	4	200
1 05 03 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	MENINGKATNYA SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	9	9	9	9	100	9	9	100
1 05 03 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaporan dan Keuangan	9	9	9	9	100	9	9	100



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcone)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (Tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2018 (Tahun lalu n-2)			Target Program/Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 (berjalan n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 05 03 16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRATIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	TERSELESAIKANNYA PERMASALAHAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN (K3)	100	104	100	94	94	100	194	194
1 05 03 16 07	Peningkatan kerjasama dengan aparat Penegak hukum dalam teknik pencegahan kejahatan dan penyelesaian permasalahan K3	Operasi penertiban pedagang kaki lima, penertiban PMKS, penertiban Pelajar/PNS/NON PNS, dan masalah K3 lainnya	100	100	100	94	94	100	194	194
1 05 03 16 08	Kegiatan patroli wilayah	Operasi pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	0	3	0	0	0	3	3	3
1 05 03 17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	TERCIPTANYA TERTIB ADMINISTRASI PELAPORAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN	12	12	12	12	100	12	24	200
1 05 03 17 58	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	12	12	12	12	100	12	24	200
1 05 03 28	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA DI DAERAH	MENINGKATNYA KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH	83	42	83	140	169	85	140	169
1 05 03 28 01	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pengendalian dan Penegakan Perda dan Perkada	Operasi pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	20	23	20	28	140	50	28	140
1 05 03 28 02	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	19	8	5	2	40	6	8	42



1.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) menetapkan dua indikator. Adapun indikator tersebut dapat disajikan kedalam tabel seperti dibawah ini :



TABEL II. 1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN NUNUKAN

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase Tingkat ketaatan masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah.			83	85	89	90	169	0	85	90	Relasiasi 2019 dan Proyeksi 2020 - 2021 menggunakan persentase target realisasi program
2	Presentase Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Keindahan.			100	100	100	100	94	0	100	100	Relasiasi 2019 dan Proyeksi 2020 - 2021 menggunakan persentase target realisasi program



Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	TEKNIK MONITORING DAN EVALUASI
1	Persentase pelanggaran PERDA yang ditangani	Pelanggaran Perda yang terselesaikan/ Jumlah Pelanggaran Perda yang dilaporkan masyarakat atau teridentifikasi oleh Satpol PP x 100 %	Data bersumber dari Bidang Penegakan Peraturan PerUU Daerah yakni data Identifikasi pelanggaran Perda oleh Satpol PP atau Laporan pelanggaran Perda dari masyarakat	Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke bidang Penegakan PerUU Daerah, melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja sasaran per triwulan
2	Presentase Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Keindahan.	Pelanggaran K3 yang terselesaikan/ Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat atau teridentifikasi oleh Satpol PP x 100 %	Data bersumber dari Bidang TibumTranmas yakni data Identifikasi pelanggaran K3 oleh Satpol PP atau Laporan pelanggaran K3 dari masyarakat	Recheck data dan perhitungan, konsultasi ke bidang TibumTranmas, melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja sasaran per triwulan



1.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan adapun isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut :

- Dukungan sarana dan prasana
- Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- Koordinasi antar instansi
- Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Perda/Perkada

Permasalahan dan hambatan yang dialami selama pada 2018 dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

1.3.1. Permasalahan dan Hambatan

Dalam upaya melanjutkan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Nunukan tahun 2016 – 2021, banyak menemui Berbagai Permasalahan dan Hambatan baik dari dalam (Intern) maupun dari luar (Eksteren). Untuk itu dituntut peran serta dan kerjasama yang sinergi dari seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, lintas instansi, Aparat penegak hukum khususnya dan masyarakat pada umumnya

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya aparatur yang menguasai permasalahan dengan spesifikasi dan kemampuan yang mumpuni.
- b. Jumlah personil masih belum memadai dibanding dengan tugas, fungsi dan letak geografis wilayah yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan Negara lain.



- c. Kualitas manajerial personil yang belum memadai
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional yang masih kurang lengkap.
- e. Sebagian masyarakat belum taat melaksanakan Perda maupun Perkada.
- f. Sinergitas antar lembaga/instansi, Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum lainnya masih sangat kurang.

Dengan permasalahan dan hambatan tersebut diatas akan sangat berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah yang telah dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terhadap capaian program nasional terutama pada Satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1.3.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan dalam upaya peningkatan pelayanan perangkat daerah menghadapi berbagai macam tantangan, diantaranya :

1. Masih rendahnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan Bupati antara lain ditandai dengan :
 - a. Maraknya pembangunan rumah/toko/gedung baru yang tidak memiliki dan/atau tidak sesuai dengan IMB serta melewati GSB.
 - b. Hampir sebagian besar rumah/bangunan masyarakat dan Pemerintah yang telah ada di Nunukan belum memiliki IMB dan melewati GSB.



- c. Maraknya *café/resto*, Tempat Hiburan Malam (THM), yang tidak sesuai dengan Perda yang mengatur tentang Penyelenggaraan hiburan umum, dan pengelolaan kebersihan.
 - d. Banyaknya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memiliki dokumen resmi
2. Semakin maraknya peredaran dan penggunaan Narkoba di masyarakat termasuk kalangan PNS, remaja dan anak sekolah yang dapat memicu kenakalan remaja, pergaulan bebas dan tindakan kriminal lainnya.

Dengan adanya tantangan tersebut, maka peluang Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Melakukan Sosialisasi, Penertiban, Pengawasan dan Evaluasi demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Nunukan yang aman, tertib, tenteram dan berbudaya;
2. Melakukan pendeteksian dini untuk memperoleh informasi dan data terhadap potensi pelanggaran Perda;
3. Berpartisipasi aktif kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan – kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan mengajak kearah yang lebih positif;
4. Terjalannya koordinasi antara PD teknis sebagai pemangku Perda dan *Stakeholder* dalam melaksanakan kegiatan penegakan Perda;
5. Adanya dukungan penuh dari jajaran pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja.



1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bahwa pada Rancangan awal RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2020, Prioritas Program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan yang tentunya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan rencana kerja SKPD Tahun 2020. Secara spesifik review rancangan awal RKPD dan hasil kebutuhan yang meliputi program/kegiatan, indikator kinerja, target, pagu indikatif, dan kebutuhan pendanaan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Adapun review terhadap rancangan awal RKPD dapat disampaikan kedalam table Tabel II. 2 dibawah ini.



Tabel II. 2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Nunukan

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar 1 Dari 3

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah	Kabupaten Nunukan	Persentase Operasi Pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	90%	82,879,825	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah	Kabupaten Nunukan	Persentase Operasi Pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	90%	82,879,825	Program Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Perda dan Perkada	Kabupaten Nunukan	Jumlah Operasi Pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	50 Operasi Penertiban	43,848,000	Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Perda dan Perkada	Kabupaten Nunukan	Jumlah Operasi Pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	50 Operasi Penertiban	43,848,000	
2	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	Kabupaten Nunukan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kepada Kelompok Masyarakat, Pelajar dan Badan Hukum	2 Kecamatan	39,031,825	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	Kabupaten Nunukan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kepada Kelompok Masyarakat, Pelajar dan Badan Hukum	2 Kecamatan	39,031,825	
II	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRATIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Kabupaten Nunukan	Persentase Penyelenggaraan Operasional Trantibum dan Kerjasama	100%	1,433,048,050	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRATIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Kabupaten Nunukan	Persentase Penyelenggaraan Operasional Trantibum dan Kerjasama	100%	1,433,048,050	
3	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam teknik pencegahan kejahatan dan penyelesaian permasalahan K3	Kabupaten Nunukan	Jumlah Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), PMKS, Pelajar/PNS/Non PNS dan permasalahan K3 lainnya	100 Operasi Penertiban	120,316,070	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum dalam teknik pencegahan kejahatan dan penyelesaian permasalahan K3	Kabupaten Nunukan	Jumlah Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), PMKS, Pelajar/PNS/Non PNS dan permasalahan K3 lainnya	100 Operasi Penertiban	120,316,070	
4	Patroli Wilayah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Patroli Wilayah pada Objek vital, kawasan rawan tertib sosial dan Fasum	3 Kali/Hari	1,257,921,980	Patroli Wilayah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Patroli Wilayah pada Objek vital, kawasan rawan tertib sosial dan Fasum	3 Kali/Hari	1,257,921,980	
5	Konsolidasi dan Pemantapan Tugas	Kabupaten Nunukan	Jumlah Kegiatan HUT Satpol PP tingkat Nasional dan Provinsi yang diikuti.	2 Kegiatan	54,810,000	Konsolidasi dan Pemantapan Tugas	Kabupaten Nunukan	Jumlah Kegiatan HUT Satpol PP tingkat Nasional dan Provinsi yang diikuti.	2 Kegiatan	54,810,000	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Rasio Personil Satpol PP yang memiliki Sertifikasi	60%	543,202,290	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Rasio Personil Satpol PP yang memiliki Sertifikasi	2 Orang	543,202,290	
6	Pendidikan dan pelatihan formal	Bogor	Jumlah PPNS pada Satpol PP	2 Orang	72,090,375	Pendidikan dan pelatihan formal	Bogor	Jumlah PPNS pada Satpol PP	2 Orang	72,090,375	
7	Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi PNS Daerah	Jakarta/Surabaya	Jumlah Personil Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Teknis Kerja dan Fungsi	10 Orang	45,218,250	Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi PNS Daerah	Jakarta/Surabaya	Jumlah Personil Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Teknis Kerja dan Fungsi	10 Orang	45,218,250	
8	Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kepada Aparatur Satpol PP	Kabupaten Nunukan	Jumlah Perda yang tersosialisasikan	5 Perda	25,893,665	Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kepada Aparatur Satpol PP	Kabupaten Nunukan	Jumlah Perda yang tersosialisasikan	5 Perda	25,893,665	
9	Pendidikan dan Pelatihan Dasar PNS Satpol PP	Bogor	Jumlah Personil Satpol PP yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	20 Orang	400,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Dasar PNS Satpol PP	Bogor	Jumlah Personil Satpol PP yang telah mengikuti Pelatihan Dasar	20 Orang	400,000,000	



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2020

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar 2 Dari 3

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
VI	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kabupaten Nunukan	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3,457,449,480	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kabupaten Nunukan	Persentase Unit Kerja Internal yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3,457,449,480	
10	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Nunukan	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	90,253,800	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten Nunukan	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Bulan	90,253,800	
11	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Nunukan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 Unit	71,910,720	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Nunukan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 Unit	71,910,720	
12	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	3,546,410	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	3,546,410	
13	Peyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	4,872,000	Peyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kabupaten Nunukan	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki	20 Unit	4,872,000	
14	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	22 Jenis	16,382,100	Penyediaan alat tulis kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	22 Jenis	16,382,100	
15	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Kabupaten Nunukan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	6,775,125	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Kabupaten Nunukan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	6,775,125	
16	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Unit	2,024,925	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Unit	2,024,925	
17	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit	10,150,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit	10,150,000	
18	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Nunukan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	250 Porsi	5,075,000	Penyediaan makanan dan minuman	Kabupaten Nunukan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	250 Porsi	5,075,000	
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	6 Kali	50,750,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	6 Kali	50,750,000	
20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan kKonsultasi ke dalam Daerah	12 Kali	25,375,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan kKonsultasi ke dalam Daerah	12 Kali	25,375,000	
21	Penyediaan jasa umum perkantoran	Kabupaten Nunukan	Jumlah Bulan Penyediaan jasa umum administrasi perkantoran	12 Bulan	3,070,334,400	Penyediaan jasa umum perkantoran	Kabupaten Nunukan	Jumlah Bulan Penyediaan jasa umum administrasi perkantoran	12 Bulan	3,070,334,400	
22	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	12 Laporan	100,000,000	Penyediaan jasa umum perkantoran	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi	12 Laporan	100,000,000	
V	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kabupaten Nunukan	Persentase Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	176,496,320	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kabupaten Nunukan	Persentase Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	176,496,320	
23	Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	265 Stel	176,496,320	Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya	Kabupaten Nunukan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	265 Stel	176,496,320	



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2020

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Lembar 3 Dari 3

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kabupaten Nunukan	Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana Aparatur	75%	78,684,450	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kabupaten Nunukan	Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana Aparatur	75%	78,684,450	
24	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	4 Unit	75,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	4 Unit	75,000,000	
25	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah Gedung/Kantor yang dipelihara rutin/berkala	8 Unit	3,684,450	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Nunukan	Jumlah Gedung/Kantor yang dipelihara rutin/berkala	8 Unit	3,684,450	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU ANGAN	Kabupaten Nunukan	Tingkat Ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	22,225,000	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEU ANGAN	Kabupaten Nunukan	Tingkat Ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	22,225,000	
26	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Kinerja	9 Laporan	15,225,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Nunukan	Jumlah Laporan Kinerja	9 Laporan	15,225,000	
27	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	7,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	7,000,000	
VIII	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARA KAT UNTUK MENJAGA KETERTIBA N DAN KEAMA NAN	Kabupaten Nunukan	Persentase Satuan Pengamanan per jumlah Desa/ Kelurahan	80%	1,435,227,631	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARA KAT UNTUK MENJAGA KETERTIBA N DAN KEAMA NAN	Kabupaten Nunukan	Persentase Satuan Pengamanan per jumlah Desa/ Kelurahan	80%	1,435,227,631	
28	Pembantuan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Kabupaten Nunukan	Jumlah Satuan Linmas per Desa/Kelurahan	10 Orang	52,887,631	Pembantuan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Kabupaten Nunukan	Jumlah Satuan Linmas per Desa/Kelurahan	10 Orang	52,887,631	
29	Sosialisasi Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Anggota Linmas yang dilakukan Sosialisasi	8 Kecamatan	153,500,000	Sosialisasi Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Anggota Linmas yang dilakukan Sosialisasi	8 Kecamatan	153,500,000	
30	Penyiapan Tenaga Pegendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Anggota Linmas yang mengikuti Pembekalan	150 Orang	1,228,840,000	Penyiapan Tenaga Pegendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kabupaten Nunukan	Jumlah Anggota Linmas yang mengikuti Pembekalan	150 Orang	1,228,840,000	
					7,229,213,046					7,229,213,046	



1.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat

Pada pelaksanaan forum Musrenbang tingkat kecamatan se Kabupaten Nunukan, tidak terdapat usulan/masukkan maupun rekomendasi untuk menjadi Program/Kegiatan Satuan polisi Pamong Praja.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020 Kabupaten Nunukan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar/Volume	Catatan
	NIHIL				



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa *Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.* Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada.

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
“Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sasaran Program Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi



Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan indikator kegiatan Jumlah daerah Kabupaten/kota yang mempunyai aparatur Satpol PP/PPNS dan Satlinmas yang sesuai standar telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Nunukan hanya saja masih belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan berbagai kendala yang dihadapi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan merupakan penjabaran atau implementasi dari RPJMD Kabupaten Nunukan dan pernyataan visi dan misi Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah "Mewujudkan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda/Perkada".

Sedangkan Sasaran dari Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Nunukan adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang menggambarkan hal-hal yang akan dilakukan secara proporsional melalui program kegiatan yang bersifat spesifik, terinci serta dapat diukur serta dicapai. Berdasarkan maksud penetapan sasaran dalam kurun waktu satu tahun yang akan dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda/Perkada, dan
2. Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan (K3).



Tabel III. 1

TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN SATPOL PP TAHUN 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TAHUN 2020
1	Mewujudkan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda/Perkada	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda/Perkada	Presentase Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda/Jumlah Pelanggaran Perda X 100%	90
		Meningkatkannya Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Persentase Penanganan pelanggaran Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Jumlah Operasi yang selesai/Target Operasi X 100%	100



3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah merupakan implementasi tugas yang dilaksanakan secara nyata dan terpadu yang merupakan Kebijakan sebagai arah dan juga dijadikan sebagai Pedoman, pegangan, petunjuk aparatur Pemerintah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan tugas dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian **Visi dan Misi** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satpol PP dalam Renja 2020 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan 2016-2021 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Nunukan sesuai dengan Misi 4 Bupati Nunukan yaitu Mewujudkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan supremasi hukum. Adapun untuk mendukung misi bupati tersebut diatas berikut kami sampaikan bahan pertimbangan rumusan Program dan Kegiatan seperti dibawah ini :

I. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2020 :

- Jumlah Program : 8
- Jumlah Kegiatan : 30
- Pagu Indikatif APBD : Rp 7.229.213.046,-

II. Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan di Tahun 2020 adalah :

- Program utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan :
 1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Daerah;
 - Peningkatan Pengawasan, Pengendalian, Penegakan Perda dan Perkada
 - Sosialisasi produk hukum Daerah kepada masyarakat



2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; dan
 - Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan dan penyelesaian permasalahan keamanan ketertiban dan keindahan (K3)
 - Kegiatan Patroli Wilayah
 - Konsolidasi dan Pemantapan Tugas
 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - Pendidikan dan pelatihan formal.
 - Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi PNS Daerah.
 - Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kepada Aparatur Satpol PP;
 - Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol PP.
 4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman
 - Pembentukan Satuan keamanan lingkungan di masyarakat
 - Sosialisasi Tenaga Pegendali Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
 - Penyiapan Tenaga Pengendali keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- Program Pendukung :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
 - Penyediaan makan dan minum kantor
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - Penyediaan jasa umum perkantoran
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta kelengkapannya
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2020 dan prakiraan maju Tahun 2021 disajikan pada Tabel IV.I seperti dibawah ini :



TABEL IV. 1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NUNUKAN

Lembar 1 Dari 3

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.3.28	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA DI DAERAH	Presentase Operasi Pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kabupaten Nunukan	89%	Rp 82,879,825	APBD II		90%	Rp 84,123,022
1.05.3.28.01	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pengendalian dan Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Operasi Pengawasan dan Penegakan Perda dan Perkada	Kabupaten Nunukan	50 Operasi	43,848,000	APBD II		50 Operasi	Rp 44,505,720
1.05.3.28.02	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada masyarakat	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada kelompok masyarakat, pelajar dan Badan Hukum	Kabupaten Nunukan	2 Kecamatan	39,031,825	APBD II		2 Kecamatan	Rp 39,617,302
1.05.3.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRATIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Presentase Penyelenggaraan Operasional Trantibum dan Kerjasama	Kabupaten Nunukan	100%	Rp 1,433,048,050	APBD II		100%	Rp 1,454,543,771
1.05.3.16.07	Peningkatan kerjasama dengan aparat Penegak hukum dalam teknik pencegahan kejahatan dan penyelesaian permasalahan K3	Jumlah Operasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), PMKS, Pelajar/PNS/NON PNS, dan permasalahan K3 lainnya	Kabupaten Nunukan	100 Operasi/Pe nertiban	120,316,070	APBD II		100 Operasi/Penerti ban	Rp 122,120,811
1.05.3.16.08	Kegiatan patroli wilayah	Jumlah Patroli Wilayah pada objek vital, kawasan rawan tertib sosial dan Fasum dalam sehari	Kabupaten Nunukan	3 kali/sehari	1,257,921,980	APBD II		3 kali/sehari	Rp 1,276,790,810
1.05.3.16.09	Konsolidasi dan pematapan tugas	Jumlah kegiatan HUT Satpol PP tingkat Nasional dan Provinsi yang diikuti	Kabupaten Nunukan	2 Kegiatan	54,810,000	APBD II		2 Kegiatan	Rp 55,632,150
1.05.3.05	PROGRAM PENIGNKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kemampuan dan Kapasitas serta pengetahuan personil Satpol PP dalam Melaksanakan Tupoksi	Jakarta/Surabaya/Jogjakarta	2 Orang	Rp 543,202,290	APBD II		1 Orang	Rp 145,350,324
1.05.3.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Bogor	2 Orang	72,090,375	APBD II		2 Orang	Rp 73,171,731



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2020

Lembar 2 Dari 3

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.3.05.05	Pendidikan dan pelatihan teknis kerja dan fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah Personil Satpol PP yang telah mengikuti diklat teknis kerja dan fungsi	Jakarta/Surabaya/Jogjakarta	10 Orang	45,218,250	APBD II		10 Orang	Rp 45,896,524
1.05.3.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Dasar PNS Satpol PP	Jumlah Personil Satpol PP yang telah mengikuti pelatihan dasar	Bogor	20 Orang	400,000,000	APBD II		-	Rp -
1.05.3.05	Sosialisasi Produk Hukum Daerah kepada Aparatur Satpol PP	Jumlah Perda yang tersosialisasikan	Kabupaten Nunukan	5 Perda	25,893,665	APBD II		5 Perda	Rp 26,282,070
1.05.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Persentase Satuan Pengamanan per jumlah desa atau kelurahan	Kabupaten Nunukan	80%	1,435,227,631	APBD II		80%	435,383,445
1.05.04.19.01	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Jumlah Satuan Linmas per Desa/Kelurahan	Kabupaten Nunukan	10 Orang	52,887,631	APBD II		10 Orang	Rp 53,680,945
1.05.04.19.02	Sosialisasi Tenaga Pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan sosialisasi	Kabupaten Nunukan	8 Kecamatan	153,500,000	APBD II		6 Kecamatan	Rp 155,802,500
1.05.04.19.03	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Anggota Linmas yang mengikuti Pembekalan	Kabupaten Nunukan	1500 Orang	1,228,840,000	APBD II		80 Orang	Rp 225,900,000
1.05.3.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase Unit Kerja Internal yang memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Nunukan	100%	3,457,449,480	APBD II		12 Bulan	3,509,311,222
1.05.3.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	90,253,800	APBD II		12 Bulan	Rp 91,607,607
1.05.3.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Kabupaten Nunukan	9 Unit	71,910,720	APBD II		9 Unit	Rp 72,989,381
1.05.3.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	3,546,410	APBD II		12 Bulan	Rp 3,599,606
1.05.3.01.09	Peyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Kabupaten Nunukan	20 Unit	4,872,000	APBD II		22 Unit	Rp 4,945,080
1.05.3.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis alat tulis kantor yang disediakan	Kabupaten Nunukan	22 Jenis	16,382,100	APBD II		24 Jenis	Rp 16,627,832
1.05.3.01.11	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	6,775,125	APBD II		12 Bulan	Rp 6,876,752
1.05.3.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kabupaten Nunukan	10 Unit	2,024,925	APBD II		10 Unit	Rp 2,055,299
1.05.3.01.13	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Nunukan	3 Unit	10,150,000	APBD II		3 Unit	Rp 10,302,250
1.05.3.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kabupaten Nunukan	250 Kotak	5,075,000	APBD II		260 Kotak	Rp 5,151,125



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2020

Lembar 3 Dari 3

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA/PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.3.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi ke Luar Daerah	Kabupaten Nunukan	6 Kali	50,750,000	APBD II		8 Kali	Rp 51,511,250
1.05.3.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dalam Daerah	Kabupaten Nunukan	12 Kali	25,375,000	APBD II		14 Kali	Rp 25,755,625
1.05.3.01.20	Penyediaan jasa umum perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa umum administrasi perkantoran	Kabupaten Nunukan	12 Bulan	3,070,334,400	APBD II		12 Bulan	Rp 3,116,389,416
1.05.3.06	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi		12 Laporan	100,000,000	APBD II		12 Laporan	Rp 101,500,000
1.05.3.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Tingkat Kepatuhan Aparatur	Kabupaten Nunukan	100%	Rp 176,496,320	APBD II		-	Rp -
1.05.3.03.22	Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya yang diadakan	Kabupaten Nunukan	265 Stel	176,496,320	APBD II		-	Rp -
1.05.3.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Kabupaten Nunukan	75%	Rp 78,684,450	APBD II		75%	Rp 79,864,717
1.05.3.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Kabupaten Nunukan	4 Unit	75,000,000	APBD II		4 Unit	Rp 76,125,000
1.05.3.02	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung/Kantor yang diperlihara rutin/berkala	Kabupaten Nunukan	8 Unit	3,684,450	APBD II		10 Unit	Rp 3,739,717
1.05.3.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kabupaten Nunukan	100%	Rp 22,225,000	APBD II		100%	Rp 22,453,375
1.05.3.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja	Kabupaten Nunukan	9 Dokumen	Rp 15,225,000	APBD II		9 Dokumen	Rp 15,453,375
1.05.3.06.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Kabupaten Nunukan	1 Dokumen	Rp 7,000,000	APBD II		1 Dokumen	Rp 7,000,000
JUMLAH					Rp 7,229,213,046				Rp 6,137,029,877



BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan Tahun 2020 sebagai suatu penjabaran dari RENSTRA Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan yang disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi serta kewenangan Satpol PP Kabupaten Nunukan.

Rencana Kerja Tahun 2020 disusun sebagai dasar pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dalam penegakan Perda dan Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan.

Dengan adanya Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Nunukan diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Nunukan dapat lebih terarah, terintegrasi dan terkoordinasi serta sinergitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada



Rencana Kerja (RENJA)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nunukan
Tahun 2020

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis
4. Kontribusi masyarakat Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta perlindungan masyarakat, yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Nunukan, 22 Juli 2019

KEPALA SATUAN,



Drs. ABDUL KADIR
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19621231 198512 1 028